



Bersama Untuk
semua #



Asri
Tanpa Kumuh
Tertata

RENCANA KERJA 2026

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan Rahmat dan Karunia-Nya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan Tahun 2026 dapat terselesaikan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Tahun 2026 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan memuat tujuan, Sasaran Strategis, Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya, Indikator Kinerja yang diselaraskan dengan Program/kegiatan dan Anggaran yang akan dilaksanakan dan dicapai pada tahun 2026.

Akhirnya semoga Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 ini dapat bermanfaat dan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana Kinerja tahunan dan penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2026. Semoga Allah SWT senantiasa selalu membimbing kita, Amin.

Kuala Pembuang, 03 September 2025

**Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN
RAKYAT, RAKYAT KAWASAN
PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN SERUYAN**



ABDUL RAJAK, S.Pi., M.M
Pembina (IV/a)
NIP. 19751109 199604 1 003

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	i
Daftar isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	10
 BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD TAHUN SEBELUMNYA.....	 12
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 dan Capaian Renstra PD.....	 12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas.....	22
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	27
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	29
2.5 Penelaahan usulan Program Kegiatan Masyarakat.....	39
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	 47
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	47
3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah	49
3.3 Program dan Kegiatan	50
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	 54
 BAB V PENUTUP	 85

DAFTAR TABEL		Hal
Tabel 1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu	12
Tabel 2	Alokasi dan Realisasi Anggaran guna Pencapaian Sasaran	13
Tabel 3	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2023.....	14
Tabel 4	Pencapaian Kinerja berkaitan dengan Perumahan dan Permukiman Layak Huni	22
Tabel 5	Pencapaian Kinerja berkaitan dengan Pertanahan	23
Tabel 6	Data Usulan TORA /PPTKH	24
Tabel 7	Data Inver TORA /PPTKH Kabupaten Seruyan	24
Tabel 8	Pencapaian Kinerja berkaitan dengan SPM tahun 2024.....	25
Tabel 9	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	26
Tabel 10	Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2026	30
Tabel 11	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025.....	40
Tabel 12	Daftar Usulan Aspirasi Masyarakat Tahun 2026 melalui Musrembang	41
Tabel 13	Usulan Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Seruyan Tahun 2026....	45
Tabel 14	Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2025.....	51
Tabel 15	Rumusan rencana program kegiatan perangkat daerah tahun 2025 dan prakiraan maju 2026	55

BAB I

PENDAHULAN

1.1 Latar Belakang

Proses Perencanaan yang baik merupakan awal bagi pembangunan daerah yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhannya. Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses perubahan menuju arah yang lebih baik dengan mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkungan, wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan menjadi tahap awal dalam proses pembangunan, yang akan menjadi pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Dengan perencanaan yang baik diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan, terutama yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen rencana pembangunan daerah. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Salah satu turunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang harus disusun oleh Perangkat Daerah (PD) adalah Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah. Dalam kerangka legislasi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengamanatkan secara lugas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi RENJA SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan

fungsi SKPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA SKPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis SKPD. Dengan demikian RENJA SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA SKPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan RENJA SKPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh SKPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan Perubahan Renja DISPERKIMTAN tahun 2025 merupakan bagian dari pelaksanaan perencanaan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Perencanaan tersebut mengacu pada RPJMD Kabupten Seruyan atas terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Oleh karena itu dalam penyusunan RENJA DISPERKIMTAN Tahun 2025 harus selaras dengan dokumen tersebut diatas dan mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana yang diamanatkan dalam PP nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan instrument untuk melakukan pengukuran kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Renja Perangkat Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RENSTRA Perangkat Daerah sesuai arahan Operasional dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD);
2. Perubahan Renja merupakan acuan untuk memasukan program kegiatan kedalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025 yang merupakan input/masukan dalam penyusunan RAPBD;
3. Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrument untuk mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Dearah tahun sebelumnya dan mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja OPD pada tahun 2026 yang merupakan tahun kedua dari pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2025-2026.

Pada dasarnya program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seuyan secara prinsip menyangkut hajat hidup masyarakat luas, yaitu dalam hal pengentasan kemiskinan melalui strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin seperti bantuan stimulan rumah menuju layak huni, permukiman layak huni yang didukung dengan kualitas hidup yang sehat. Terkait dengan hal tersebut perlu disusun suatu perencanaan program/kegiatan yang konseptual dan realistis yang mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen-dokumen perencanaan formal baik ditingkat nasional maupun provinsi.

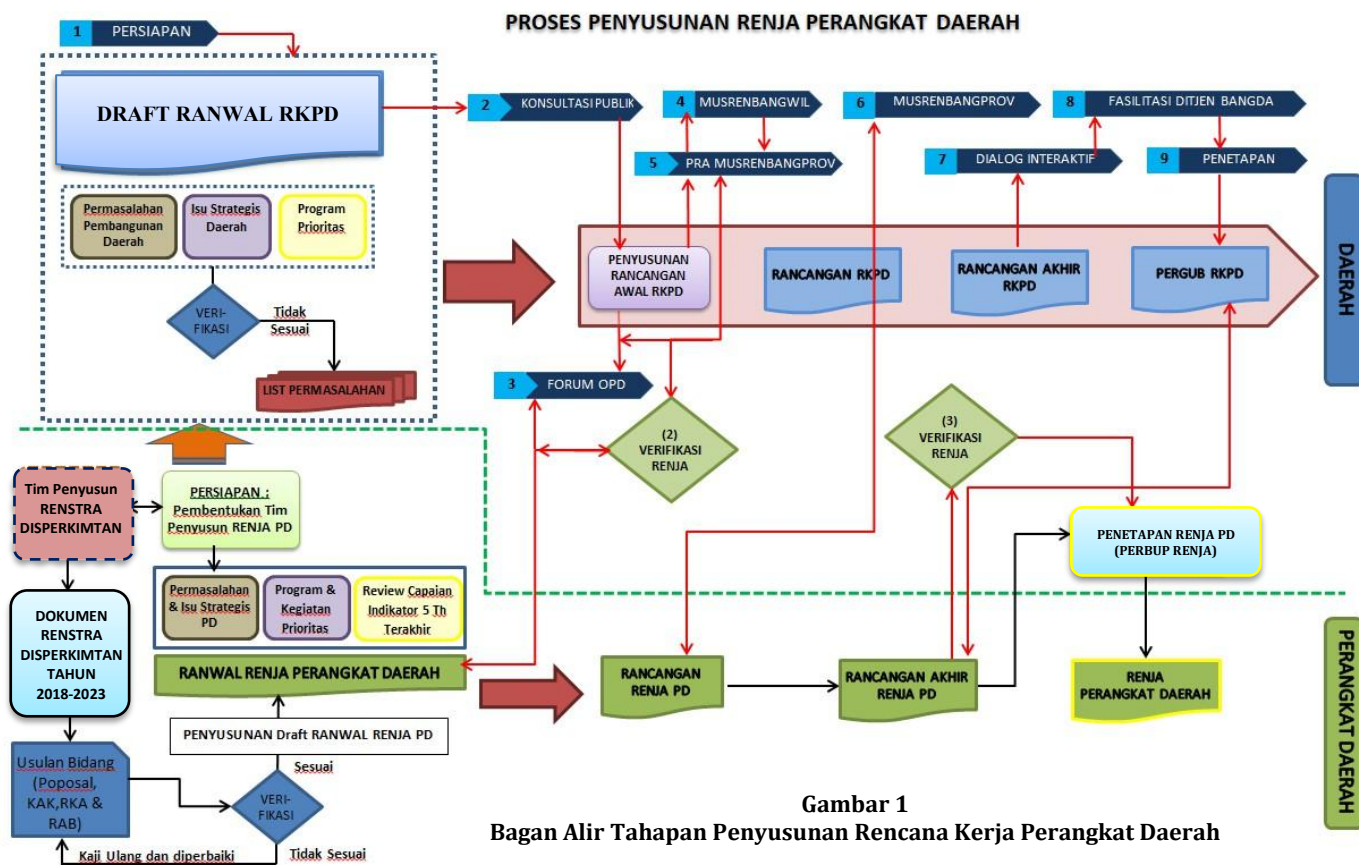
Mengingat arti strategis dokumen RENJA-PD dalam mendukung penyelenggaraan Program Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA-PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain:

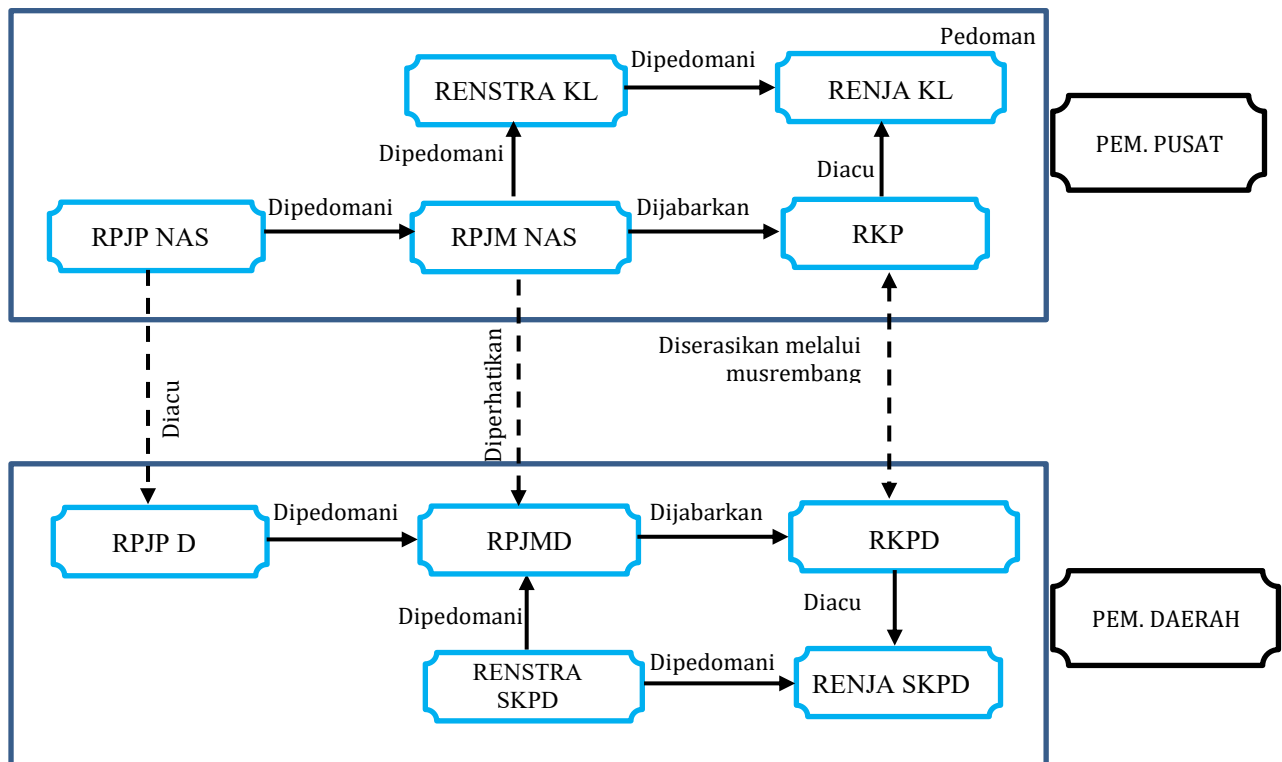
1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA-PD tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan;
2. Program dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam misi RPJMD pada tahun berkenaan;
3. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh pemangku kepentingan dalam forum Musrembang;
4. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Sejakan dengan Visi Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah kabupaten Seruyan yaitu “TERWUJUDNYA TRANSFORMASI PEMBANGUNAN KABUPATEN SERUYAN YANG BERKELANJUTAN, SEJAHTERA, ADIL, MAJU DAN AMANAH UNTUK SEMUA”, maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan menetapkan tujuan dan sasaran untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Mengingat beberapa hal yang telah diuraikan di atas, maka perlu disusun RENJA Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan Tahun

Anggaran 2025. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun Anggaran 2025 diharapkan dapat menjadi dasar yang objektif, efisien dan tepat sasaran dalam pelaksanaan program/kegiatan. Selain itu, diharapkan dapat memberikan orientasi dan komitmen target serta sasaran masa depan pada masing-masing program/kegiatan.





Gambar 2
Keterkaitan Renja dengan Dokumen RKPD, Renstra, Renja K/L dan Renja
Provinsi/Kabupaten Kota

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan Tahun 2025 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402));
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

20. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 120);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
23. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6)
24. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045. (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 69. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 98)

I.3 Maksud dan Tujuan

Adapun Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan Tahun 2026 adalah untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan lingkup Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai dengan visi misi dan tujuan serta sasaran Bupati dan Wakil Bupati Terpilih tahun 2025-2029. Selain itu

juga sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan tahun 2026 dan Perkiraan capaian pelaksanaan Renja tahun 2026 yang selanjutnya dijadikan pertimbangan dalam menyusun perubahan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan Tahun 2026.

Secara umum tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan adalah :

1. Menjabarkan arahan Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 yang dilaksanakan pada Tahun 2026
2. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan yang mengacu pada Visi dan Misi Bupati Terpilih.
3. Untuk memasukan program/kegiatan yang ada di Perubahan Renja kedalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2026 serta sebagai pedoman penyusunan pelaksanaan program/kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan tahun 2026.
4. Sebagai instrument pengukur secara kualitatif dan kuantitatif capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan dalam kurun waktu satu tahun serta capaian kinerja tahunan.
5. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan ini mengacu pada panduan tata cara penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan. Sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan, proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, keterkaitan antara renja perangkat daerah dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok-pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat daerah, susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Pada bab ini bersisi uraian Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat daerah juga memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu dan capaian Renstra Disperkimtan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan kabupaten Seruyan.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dnas.

2.4. Reviu terhadap Rancangan awal RKPD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada Bab ini berisi uraian telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah serta program dan kegiatan.

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan kabupaten Seruyan.

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SEBELUMNYA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan RENJA Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan Tahun 2024 dilakukan dengan melihat indikator Kinerja yang sudah ditentukan.

Anggaran belanja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan tahun 2024 direncanakan sebesar Rp 11.457.655.744,00 yang terdiri dari belanja Pegawai Rp 4.433.202.104 Belanja Barang Jasa Rp 3.717.671.696 Belanja Bantuan Sosial Rp 1.920.000.000 dan belanja Modal sebesar Rp. 1.386.781.944. Sedangkan Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp 4.342.947.628 (97,96%), Belanja barang jasa sebesar Rp 3.270.071.705 (87,96), Belanja bantuan Sosial sebesar Rp 1.885.000.000 (98,18%) dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.336.252.502,92 (98,36%).

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEBELUMNYA (Tabel 1)

URAIAN	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
BELANJA DAERAH	11.457.655.744	10.834.271.835,92	94,56	11.729.381.388
BELANJA OPERASI	10.070.873.800	9.498.019.333	94,31	10.584.917.388
Belanja Pegawai	4.433.202.104	4.342.947.628	97,96	3.986.555.845
Belanja Barang dan Jasa	3.717.671.696	3.270.071.705	87,96	3.343.373.543
Belanja Bantuan Sosial	1.920.000.000	1.885.000.000	98,18	3.254.988.000
BELANJA MODAL	1.386.781.944	1.336.252.502,92	96,36	1.144.464.000
SURPLUS/(DEFISIT)	(11.457.655.744)	(10.834.271.835,92)	94,56	(11.729.381.388)

Alokasi Belanja yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2024 dalam rangka melaksanakan 4 (empat) sasaran yang hendak dicapai adalah sebesar Rp. 11.457.655.744 Dengan rincian sebagai berikut :

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN GUNA PENCAPAIAN SASARAN

(Tabel 2)

No	Sasaran	Target Keuangan 2024	Realisasi 2024 Rp	%
1.	Terlaksananya Pembangunan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota	576.633.000	575.139.127	99,74
2.	Meingkatnya Kualitas Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang berpenghasilan rendah	2.269.160.600	2.130.426.614	93,88
3.	Meningkatnya hunian yang layak dan terjangkau serta didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai	651.545.544	600.910.402,92	92,23
4.	Meningkatnya Layanan dan Informasi Pertanahan	478.641.000	365.391.811	76,34
TOTAL		3.975.989.144	3.671.867.954,92	92,35

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja keuangan antara rencana dan realisasi dari 4 (empat) sasaran yang terdiri 8 Program dan 10 Kegiatan yang telah dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan adalah sebesar 92,35%.

Sedangkan untuk program yang mendukung terlaksanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan berada di Bidang Perumahan yakni Pelaksanaan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana dan Relokasi Masyarakat terdampak Program Kabupaten/Kota dengan target keuangan Rp. 501.347.000 dengan realisasi Rp. 500.973.900 atau 99,92%. Sementara untuk program kegiatan yang bersifat rutin berada di sekretariat. Target keuangan kegiatan dimaksud Rp. 7.481.666.600 dan terealisasi sebesar Rp. 7.162.403.881 atau 95,73%.

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2024

(tabel 3)

Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Tahun 2024 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)	
								I		II		III		IV							
		K			K			K		K		K		K		K		K		K	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Unit Kerja yang terlaksana penunjang urusan pemerintah daerah	90		23.063.492.400	90	%	7.481.666.600	70	1.555.953.440	70	1.385.226.512		1.768.278.930	-	2.044.087.739		6.786.403.881	-	6.712.375.771	-	29,10
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	33	dokumen	870.960.000	11	dokumen	290.320.000	3	9.028.500		30.166.460		16.484.888		220.284.524		286.515.172	-	286.515.172	-	32,90
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	dokumen	156.700.000	3	dokumen	238.086.000	2	3.855.400		16.249.300	-	8.828.288	-	206.497.924	2	235.430.912	2	235.430.912	22	150,24
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	dokumen	128.500.000	2	dokumen	36.132.000	1	5.173.100	0	8.796.360	-	7.656.600	-	13.786.600	1	35.412.660	1	35.412.660	17	27,56
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	dokumen	11.250.000	1	dokumen	2.250.000			1	1.050.000		500.000		700.000	1	2.250.000	1	2.250.000	33	20,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	dokumen	85.000.000	5	dokumen	13.852.000			3	4.070.800		5.626.800	2	3.724.000	5	13.421.600	5	13.421.600	33	15,79
Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Jumlah unit kerja yang teryalani administrasi keuangannya	5	unit kerja/Bidang	14.212.355.400	4	unit kerja/Bidang	4.310.677.104	38	1.250.705.747		811.185.428		1.029.648.229		1.138.986.374		4.230.525.778	-	4.220.493.428		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	114	Pegawai	14.073.095.400	38	Pegawai	4.284.450.104	38	1.247.684.997	0	807.734.628	-	1.028.468.229	-	1.127.689.774	38	4.211.577.628	38	4.211.577.628	33	29,93
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	36	dokumen	56.000.000	12	dokumen	11.843.000		2.510.750	3	-		-	9	7.521.600	12	10.032.350				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	6	laporan	83.260.000	2	laporan	14.384.000	1	510.000	-	3.450.800		1.180.000	1	3.775.000	2	8.915.800	2	8.915.800	33	10,71

	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang terlayani administrasi BMDnya	4	unit kerja/ Bidang	157.830.000	4	unit kerja/ Bidang	51.001.000	-	8.289.300	-	12.944.300	43.540.060	12.944.300							
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6	dokum en	46.500.000	2	dokume n	13.915.000	-	0	-	-	12.944.300	12.944.300	2	12.944.300	33	27,84			
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	36	Lapora n	111.330.000	12	Laporan	37.086.000	8.289.300	7	17.324.860	5	4.981.600	30.595.760	12						
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang tertangani administrasinya	85	pegaw ai	1.007.834.000	85	pegawa i	424.045.650	15.850.000	0	29.612.334	-	197.069.502	135.640.290	5	378.172.126	5	378.172.126	6	37,52	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	480	stell	396.000.000	160	stell	174.057.900	-	-	153	126.435.000	7	35.700.000	160	162.135.000	160	162.135.000			
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	240	dokum en	58.230.000	80	dokume n	19.362.000	-	-	0	-	-	12.138.800	-	5.733.900	-	17.872.700	-	30,69	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	18	kegiat an	26.500.000	6	kegiata n	5.128.750	850.000	0	-	-	-	4.275.000	6	5.125.000	6	5.125.000	33	19,34	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15	Pegaw ai	89.004.000	5	Pegawa i	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	30	pegaw ai	438.100.000	10	pegawa i	225.497.000	15.000.000	6	29.612.334	-	58.495.702	89.931.390	24	193.039.426	24	193.039.426	80	44,06	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang terlayani administrasi umumnya	5	unit kerja	1.862.814.000	4	unit kerja	775.809.650	136.708.750	0	225.431.884	235.752.670	153.325.300	4	751.218.604		717.818.604				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	45	paket	30.720.000	15	paket	10.239.100	-	-	6	-	4.050.000	6.180.000	6	10.230.000	6	10.230.000	13	33,30	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	120	paket	340.209.000	40	paket	113.395.600	42.346.150	10	11.735.000	10	59.157.500	-	40	113.238.650	40	113.238.650	33	33,29	

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30	paket	37.500.000	10	paket	12.500.000	4	-	5	6.057.550	1	6.427.500	-	-	10	12.485.050	10	12.485.050	33	33,29
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	paket	442.185.000	20	paket	177.148.200	-	-	10	67.511.550	20	40.584.300	-	69.015.000	30	177.110.850	30	177.110.850	50	40,05
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	18	paket	30.000.000	6	paket	41.690.000	5	-	1	31.650.000	-	4.050.000	-	5.950.000	6	41.650.000	6	41.650.000	33	138,83
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	45	dokumen	37.200.000	15	dokumen	12.400.000	15		0	4.400.000		880.000		5.280.000	15	10.560.000				
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	24	paket	73.500.000	8	paket	24.382.750			2	1.424.000	6	20.366.000		1.050.000	8	22.840.000				
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	405	Laporan	871.500.000	135	laporan	384.054.000	30	94.362.600	50	102.653.784	55	100.237.370	-	65.850.300	135	363.104.054	135	363.104.054	33	41,66
Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah unit kerja yang teryalani administrasi umumnya	4	unit kerja	1.425.000.000	4	unit kerja	620.322.400	2	14.750.000		107.965.000		-		76.125.000	2	198.840.000		198.840.000		
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	30	buah	970.000.000	10	unit	419.672.000		-		-	10	376.000.000		-	10	376.000.000	10	376.000.000	33	38,76
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	300	buah	455.000.000	100	buah	200.650.400		14.750.000	80	107.965.000	-	-	20	76.125.000	100	198.840.000	100	198.840.000	33	43,70
Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit kerja yang teryalani jasa Penunjang urusan pemerintahnya	4	unit kerja	2.599.744.000	4	unit kerja	676.236.896		102.112.943		137.572.106		194.355.391		185.692.496		619.732.936		619.732.936		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1500	lembar	42.900.000	1430	lembar	14.300.000	250	2.500.000	200	2.000.000	400	4.000.000	580	5.800.000	1.430	14.300.000	1.430	14.300.000	95	33,33
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144	Laporan	498.510.000	36	laporan	98.004.360	9	4.445.893	9	13.889.696	9	33.223.651	9	41.013.256	36	92.572.496	36	92.572.496	25	18,57
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	Laporan	2.058.334.000	9	laporan	563.932.536	3	95.167.050	3	121.682.410	3	157.131.740	3	138.879.240	12	512.860.440	12	512.860.440	33	24,92
Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah unit kerja yang teryalani	4	unit kerja	926.955.000	4	unit kerja	333.253.900	4	26.797.500		35.004.000		94.968.250		121.089.455	4	277.859.205	4	277.859.205		

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	administrasi umumnya																				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	60	unit	727.020.000	20	unit	224.133.900	6	26.797.500	6	20.015.000	6	66.692.250	2	56.028.455	20	169.533.205	20	169.533.205	33	23,32
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150	unit	125.070.000	30	unit	62.620.000		-	10	10.720.000	10	18.570.000	10	33.280.000	30	62.570.000	30	62.570.000	20	50,03
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18	gedung	74.865.000	6	gedung	46.500.000		-	3	4.269.000	-	9.706.000	-	31.781.000	3	45.756.000	3	45.756.000	17	61,12
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PERSENTASE RUMAH YANG DITANGANI AKIBAT BENCANA	90	%	2.876.728.000	85	%	576.633.000		18.564.100		145.034.300		42.114.325		349.095.602	-	575.139.127	-	596.342.452	-	
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah data rumah yang didata akibat bencana atau relokasi Program Kabupaten/kota	30	dokumen	365.500.000	8	dokumen	44.958.000		3.796.200		3.356.200						44.890.325	-	44.890.325	-	12,28
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	12,00	dokumen	165.000.000	4	Dokumen	21.204.000	2	3.796.200	-	-	2,00	13.097.125		4.310.000	4	21.203.325	4	21.203.325		
Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	12	dokumen	200.500.000	4	dokumen	23.754.000		-	1	3.356.200	1	3.500.000	2	16.830.800	4	23.687.000	4	23.687.000	33	11,81
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah yang dibangun dan direhab	72	unit rumah	2.322.292.000	24	Unit rumah	501.347.000		12.744.800		141.678.100		20.028.400		326.522.600	-	500.973.900	-	500.973.900		
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	45	unit rumah	1.386.680.000	15	Unit rumah	94.948.000	4	5.821.600	0	-	5	20.028.400	6	69.048.500	15	94.898.500	15	94.898.500	33	6,84
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	30	unit rumah	935.612.000	10	Unit rumah	406.399.000	2	6.923.200	2	141.678.100		-	6	257.474.100	10	406.075.400	10	406.075.400	33	43,40
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah izin yang diterbitkan	12	ijin	188.936.000	4	ijin	30.328.000		2.023.100		-		8.988.800		18.263.002	-	29.274.902	-	29.274.902		

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	12	Laporan	188.936.000	4	Laporan	30.328.000	1	2.023.100		-	1	8.988.800	2	18.263.002	4	29.274.902	4	29.274.902	33	15,49
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	CAKUPAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	85	%	5.689.923.000	85	%	1.932.975.000		25.279.700		16.886.600		703.599.386		1.135.887.492		1.881.653.178		1.881.653.178		
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	Jumlah Laporan Kawasan kumuh yang ditata dan tingkatkan	6	dokumen	296.592.000	4	dokumen	-														
Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	6	dokumen	296.592.000	4	dokumen	-		-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan pemukiman kumuh yang ditingkatkan	10	kawasan	5.393.331.000	5	kawasan	1.932.975.000		25.279.700		16.886.600		703.599.386		1.135.887.492	-	1.881.653.178	-	1.881.653.178		
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	75	unit	1.267.250.000	15	unit	584.331.000	6	9.457.100	0	-	-	146.681.686	9	416.879.892	15	573.018.678	15	573.018.678	20	45,22
Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	100	unit	4.126.081.000	20	unit	1.348.644.000		15.822.600	0	16.886.600	5	556.917.700	10	719.007.600	15	1.308.634.500	15	1.308.634.500	15	31,72
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	CAKUPAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	85	%	1.706.500.000	85	%	336.194.600		4.156.800		28.272.500		14.718.000		201.626.136		248.773.436		248.773.436		
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemukiman Kumuh yang ditangani	18	kawasan	1.706.500.000	6	kawasan	336.194.600		4.156.800		28.272.500		14.718.000		201.626.136		248.773.436		248.773.436		
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh	60	rumah	1.171.000.000	20	rumah	277.670.600	2	4.156.800		-	4	14.718.000	14	180.727.089	20	199.601.889	20	199.601.889	33	17,05

Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	8	Lapora n	535.500.000	4	laporan	58.524.000			2	28.272.500	-	-	2	20.899.047	4	49.171.547	4	49.171.547	50	9,18
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	CAKUPAN PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	80	%	1.195.852.000			651.545.544		7.599.300						578.187.903		600.910.403		600.910.403		
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah PSU Perumahan yang di selenggarakan	30	paket	1.195.852.000		Areal	651.545.544		7.599.300		-		15.123.200		578.187.903		600.910.403		600.910.403		
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	9	lokasi	405.000.000	3	lokasi	651.545.544		7.599.300		-	3	15.123.200		578.187.903		600.910.403	-	600.910.403	-	148,3 7
Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	9	lokasi	790.852.000	3	lokasi	-		-		-	3	-				-	-	-	-	
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase sengketa tanah garapan yang diselesaikan	85	%	782.343.000			39.770.000		-		-		21.238.800		17.547.500		38.786.300		38.786.300		
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah sengketa tanah garapan yang diselesaikan	15	Dokum en	782.343.000	5	Dokum en	39.770.000		-		-		21.238.800		17.547.500		38.786.300		38.786.300		
Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah data sengketa, konflik dan perkara dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	15	dokum en	404.996.000	5	dokume n	19.861.000					5	14.389.500		5.113.100		19.502.600		19.502.600		
Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah BA hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah garapan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	6	Berita Acara	377.347.000	3	Berita Acara	19.909.000					3	6.849.300		12.434.400		19.283.700		19.283.700		
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase ganti kerugian dan santunan tanah yang diselesaikan	85	%	194.778.000			19.873.000		-		-		8.302.500		10.476.400		18.778.900	-	18.778.900	-	-
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan	Jumlah dokumen Penvelesaian	14	dokum en	194.778.000	4	dokume n	19.873.000		-		-		8.302.500		10.476.400		18.778.900		18.778.900		

Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Masalah Ganti Kerugian dan santunan Tanah																		
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12	dokumen	194.778.000	4	dokumen	19.873.000	-	-	4	8.302.500	10.476.400	4	18.778.900	4	18.778.900	33	9,64	
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	CAKUPAN REDISTRIBUSI TANAH SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	85	%	1.479.748.000			209.813.000	13.416.400	45.304.400		37.542.800	108.054.619		204.318.219		204.318.219			
Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah data subjek dan Objek Redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah yang ditetapkan	3	dokumen	1.479.748.000	1	dokumen	209.813.000	13.416.400	45.304.400		37.542.800	108.054.619		204.318.219		204.318.219			
Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12	dokumen	709.874.000	4	dokumen	96.986.000	-	26.685.200	4	27.062.600	41.422.200		95.170.000		95.170.000			
Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	6	dokumen	769.874.000	2	dokumen	112.827.000	13.416.400	18.619.200		10.480.200	66.632.419		109.148.219		109.148.219			
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	CAKUPAN PENGGUNAAN TANAH	85	%	1.511.779.600	85	%	209.185.000	-	-		17.147.892	66.985.700	-	84.133.592	-	84.133.592	-	5,57	
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tanah yang hamparannya digunakan	6	Bidang tanah	1.511.779.600	3	Bidang Tanah	209.185.000	-	-		17.147.892	66.985.700		84.133.592	-	84.133.592	-	5,57	
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	30	Laporan	244.329.600	10	kegiatan	169.206.000	-	0	-	8.230.200	9	56.082.400	9	64.312.600	9	64.312.600	30	26,32

Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah	100	dokum en	1.052.200.000	10	Dok	19.997.000		-		-	10	8.917.692	1 0	10.903.300	20	19.820.992	2 0	19.820.992	20	1,88
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	42	dokum en	215.250.000	12	Dok	19.982.000							1 2	15.264.000		15.264.000	-	15.264.000	-	1,95

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan yaitu urusan wajib pelayanan dasar Perumahan Rakyat dan Urusan wajib non Pelayanan dasar Pertanahan. Urusan ini dilaksanakan dengan 9 Program dan 15 kegiatan.

Capaian Kinerja pelayanan pada tahun 2026, indikator kinerja pelayanan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Standar pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan RPJMD Kabupaten Seruyan 2025-2029. Dalam menentukan tolok ukur dan indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan, setelah mengacu pada indikator kinerja Utama pada RPJMD sebagai indikator yang harus dicapai Kepala Daerah, indikator ini digunakan sebagai tujuan dari Kepala Perangkat Daerah (Kepala Dinas) sebagai indikator tujuan pada sektor Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang dikemudian dijabarkan sebagai indikator program dan indikator kegiatan.

Pencapaian kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tercantum dalam table sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja berkaitan dengan Perumahan dan Permukiman Layak Huni (table 4)

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Meningkatnya Kualitas Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang berpenghasilan rendah	Rasio rumah layak huni	57,50%	65,00
		Persentase lingkungan permukiman kumuh	19,58%	19,58
2	Meningkatnya hunian yang layak dan terjangkau serta didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai	Persentase Lingkungan Perumahan yang sehat dan aman serta didukung dengan PSU yang memadai	81,97	81,97

Upaya untuk mengurangi kawasan kumuh dan meningkatkan kualitas pemukiman dilaksanakan melalui Program Perumahan dan Program Kawasan Permukiman serta Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh. Program ini memiliki indikator kinerja yaitu :

- Rasio Rumah Layak Huni dari target 57,50% dapat direalisasikan 65% sehingga kinerja nya mencapai 113 %. Hasil Pendataan Tahun 2024 ini Jumlah Rumah tidak layak huni layak huni di Kabupaten Seruyan sebanyak 4.980 unit. Pencapaian kinerja ini diperoleh dari kegiatan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada tahun 2025 yang mendapat bantuan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah masih belum ada informasi, pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi rumah oleh pemerintah Kabupaten Seruyan sebanyak 41 unit.
- Penurunan Kawasan kekumuhan dalam hal infrastruktur dapat dengan memperbaiki jalan jalan yang tidak layak menjadi layak dengan program semenisasi di beberapa desa.

Pencapaian Kinerja berkaitan dengan Pertanahan
(tabel 5)

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Meningkatnya Layanan dan Informasi Pertanahan	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100	100
		Persentase Layanan dan informasi teknis pertanahan yang diselesaikan	0	0
		Persentase luas lahan bersertifikat	5%	5%

Upaya untuk meningkatkan luasan Kawasan yang dapat diterbitkan sertifikatnya adalah dengan mempercepat program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Usulan TORA yang dimohonkan untuk dilakukan Inventarisasi dan Verifikasi PPTKH di Kabupaten Seruyan adalah seperti tergambar pada tabel dibawah ini :

Data usulan TORA/PPTPKH

(Tabel 6)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Usulan TORA PPTPKH Kab. Seruyan	±39.552,13 Ha	±125.920,44 Ha	±129.610,67 Ha	±137.522,97 Ha	±130.265,00 Ha
• Permukiman	±720,10 Ha	±1.724,29 Ha	±1.724,30 Ha	±1.890,92 Ha	±3.592,16 Ha
• Fasum/Fasos	±325,49 Ha	±2.006,67 Ha	±2.555,65 Ha	±2.009,94 Ha	
• Lahan Garapan	±38.506,54 Ha	±122.189,48 Ha	±125.330,72 Ha	±133.622,11 Ha	± 126.672,84 Ha
Peta Indikatif TORA (KLHK)				±108.671,69 Ha	±60.196,00 Ha
Kegiatan Inver TORA PPTPKH Kab. Seruyan Tahun 2024 (Area of Interest / AOI)					±58.937,94 Ha
Arahan dan Rekomendasi Inver PPTPKH Kab Seruyan Tahun 2024, sbb :					±58.937,94 Ha
• Perubahan Batas					±11.276,65 Ha (8.311 Bidang)
• Perhutanan Sosial					±27.344,61 Ha (8.452 Bidang)
• Tdk Rekomendasi					±20.316,68 Ha (2.079 Bidang)

Data Inver TORA/PPTPKH Kabupaten Seruyan

(Tabel 7)

REKAPITULASI HASIL INVENTARISASI DAN VERIFIKASI PPTPKH KABUPATEN SERUYAN					
NO	KECAMATAN	REKOMENDASI (HA)			JUMLAH
		PERUBAHAN BATAS	PERHUTANAN SOSIAL	TIDAK REKOM	
1	SERUYAN HILIR	4.172,59	7.791,24	2.911,43	14.875,26
2	SERUYAN HILIR TIMUR	1.406,65	4.316,20	1.181,40	6.904,25
3	DANAU SEMBULUH	221,31	3.419,17	3.764,56	7.405,04
4	SERUYAN RAYA	264,21	981,85	816,51	2.062,57
5	DANAU SELULUK	229,18	335,36	426,29	990,82
6	HANAU	1.154,58	2.086,15	1.582,69	4.823,42
7	BATU AMPAR	741,41	1.119,84	801,67	2.662,92
8	SERUYAN TENGAH	1.079,52	2.349,46	2.320,39	5.749,36
9	SERUYAN HULU	1.050,17	3.375,14	5.858,91	10.284,22
10	SULING TAMBUN	957,03	1.570,20	652,83	3.180,06
TOTAL		11.276,65	27.344,61	20.316,68	58.937,94

Pencapaian Kinerja berkaitan dengan SPM tahun 2024
(tabel 8)

No	Jenis Pelayanan	Batas Waktu Pencapaian	Capaian	
			Target	Realisasi
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak bagi korban bencana kabupaten/kota	2024	4 unit	4 unit
	Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten/kota	2024	2 unit	2 unit

Untuk dapat memenuhi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan telah mentargetkan 4 unit Pembangunan baru dan 2 Unit untuk Rehabilitasi. Pelaksanaan Pembangunan dan rehabilitasi rumah sebagian diperuntukan bagi korban musibah kebakaran yang terjadi di Kabupaten Seruyan

Terkait penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah masih dalam tahap penetapan lokasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Saat ini pemerintah Kabupaten Seruyan sudah mempunyai sebidang tanah untuk relokasi dimaksud yang merupakan hibah dari masyarakat.

Aadapun Indikator Kinerja Pelayan yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan tersaji pada table dibawah ini :

Tabel TC.30 (Tabel 9)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian Tahun 2024	Analisa Catatan
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-10	-12
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten /kota	✓		100%	100%	100%	100%	
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten / kota	✓		100%	100%	100%	100%	
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani		✓	76,42	78,33	80,29	78%	
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)		✓	9 %	9,50%	10,00 %	9%	
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)		✓	2	4	6	2	
6	Persentase Rumah Layak Huni		✓	57,5	60	62,50	65%	
7	Rasio permukiman layak huni		✓	55,68	57,68	58,68	58,68	
8	Persentase pemukiman yang tertata		✓	36,18	37,56	40,48	86,18	
9	Persentase lingkungan pemukiman kumuh		✓	19,58	19,45	19,17	19,58	
10	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan		✓	12,4	10,45	9,89	12,4	
11	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU		✓	81,97	83,34	85,55	81,97	
12	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan		✓	100%	100%	100%	100%	
13	Persentase pemohon sertifikat yang telah diselesaikan		✓	100%	100%	100%	100%	
14	Penyelesaian kasus tanah Negara		✓	1 kasus	1 kasus	1 kasus	2 kasus	
15	Persentase luas lahan bersertifikat		✓	5%	5,20%	5,50%	5%	
16	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi		✓	4 kasus	4 kasus	4 kasus	4 kasus	

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan

Pembangunan kawasan perumahan dan permukiman menjadi suatu kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk tinggal dan meneetap secara permanen. Pemerintah Kabupaten Seruyan memiliki kewajiban untuk memfasilitasi kebutuhan dasar tersebut seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan permukiman.

Berdasarkan Tugas pokok dan fungsinya dalam membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dan rencana strategis di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
2. Penetapan rencana kerja dan anggaran di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan pertanahan;
4. Penyelenggaraan peningkatan kualitas sumberdaya manusia aparatur di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan pertanahan;
5. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
6. Penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tidak terlepas dari dasar peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan Bupati tentang penjabaran tugas dan fungsi masih dijumpai adanya tumpang tindih kewenangan pelaksanaan tugas/fungsi pada Bidang Cipta Karya dan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dimana bidang-bidang tersebut berkaitan dengan penyediaan infrastruktur lingkungan permukiman.

Selain berkaitan dengan penjabaran tugas, hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas adalah kendala/hambatan dalam proses perencanaan dan pengelolaan anggaran, berkaitan dengan proses peralihan perubahan nomenklatur

berakibat pada belum matangnya proses perencanaan anggaran sehingga pelaksanaan anggaran juga tidak dapat berjalan optimal.

Dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2026, isu-isu penting yang mendasari adalah sebagai berikut :

Isu strategis Bidang Perumahan

1. Pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
2. Pemenuhan kebutuhan perumahan akibat Bencana dan dampak Relokasi akibat Kebijakan Pemerintah Daerah.
3. Penyediaan berbagai jenis perumahan sesuai kebutuhan, termasuk rumah umum, rumah swadaya, dan rumah khusus

Isu strategis Bidang Kawasan Permukiman

1. Penataan kawasan permukiman kumuh menjadi kawasan permukiman yang layak huni;
2. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar permukiman, seperti penyediaan air bersih, sanitasi, dan drainase;
3. Pengembangan infrastruktur permukiman yang berkelanjutan dan ramah lingkungan;
4. Pengelolaan kawasan kumuh agar lebih bersih, sehat, dan aman;
5. Pengembangan kawasan hijau dan ruang terbuka hijau di kawasan permukiman.

Isu strategis Bidang Pertanahan

1. Penyediaan data dan informasi pertanahan yang akurat dan terpercaya;
2. Penyelesaian sengketa pertanahan secara adil dan berkelanjutan;
3. Pemanfaatan lahan secara optimal untuk pembangunan perumahan dan permukiman
4. Percepatan alih fungsi Kawasan melalui Program TORA/PPTPKH

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD / Renstra SKPD menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perubahan SKPD. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan SKPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Dikaitkan dengan visi dan misi yang tertuang dalam RPD 2025-2029 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, maka fungsi dan tugas Dinas Perumahan Rakyat Kawasan, Permukiman dan Pertanahan terkait erat dengan pencapaian Misi ke-3 yaitu *Mewujudkan Pemerataan Pembangunan, Kemandirian Desa, dan Inovasi Layanan Publik*.

Secara keseluruhan hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD/renstra SKPD dapat dilihat pada table berikut :

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL DAN RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2026

DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

(Tabel 10)

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				RANCANGAN AKHIR RKPD			
		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Unit Kerja yang terlaksana penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Seruyan	90%	7.666.467.380	Persentase Unit Kerja yang terlaksana penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Seruyan	90%	6.500.316.094
	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun</i>	Kab. Seruyan	16 dokumen	141.100.000	<i>Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun</i>	Kab. Seruyan	9 dok	18.225.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Seruyan	3 Dokumen	55.850.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Seruyan	3 Dokumen	11.550.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Seruyan	2 Dokumen	45.750.000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Seruyan	2 Dokumen	4.275.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Seruyan	1 Dokumen	4.500.000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Seruyan	1 Dokumen	2.400.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Seruyan	5 Dokumen	35.000.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Seruyan	5 Dokumen	0
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah unit kerja yang terlayani administrasi keuangannya</i>	<i>Kab. Seruyan</i>	<i>4 Unit</i>	<i>4.851.777.800</i>	<i>Jumlah unit kerja yang terlayani administrasi keuangannya</i>	<i>Kab. Seruyan</i>	<i>4 Unit</i>	<i>5.070.219.414</i>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Seruyan	38 Pegawai	4.795.357.800	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Seruyan	38 Pegawai	5.063.719.414

	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Seruyan	12 Dokumen	22.000.000	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Seruyan	12 Dokumen	1.800.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Seruyan	2 laporan	34.420.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Seruyan	2 dokumen	4.700.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang milik Daerah yang di Kelola	Kab. Seruyan	1500 buah	52.610.000	Jumlah Barang milik Daerah yang di Kelola Jumlah Unit kerja yang terlayani administrasi keuangannya	Kab. Seruyan	1500 buah 100%	9.956.000
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Seruyan	2 dokumen	15.500.000	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Seruyan	2 dokumen	9.106.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Seruyan	12 laporan	37.110.000	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Seruyan	2 Laporan	850.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang bertanggung jawab administrasinya	Kab. Seruyan	80 Pegawai	363.278.000	Jumlah pegawai yang bertanggung jawab administrasinya	Kab. Seruyan	70 Pegawai	53.700.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Seruyan	160 stel	132.000.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Seruyan	70 stel	52.000.000
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Seruyan	80 Dokumen	19.410.000	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Seruyan	80 Dokumen	0
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Seruyan	6 kegiatan	9.500.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Seruyan	6 kegiatan	1.700.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Seruyan	5 pegawai	29.668.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Seruyan	5 pegawai	0

	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Seruyan	10 pegawai	172.700.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Seruyan	10 pegawai	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang teryalani administrasi umumnya	Kab. Seruyan	4 Unit	620.938.000	Jumlah unit kerja yang teryalani administrasi umumnya	Kab. Seruyan	4 Unit	307.973.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	15 paket	10.240.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	15 paket	10.249.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	40 paket	113.402.600	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	40 paket	76.081.800
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	10 paket	12.500.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	10 paket	12.500.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		20 paket	147.395.000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Seruyan	20 paket	64.785.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Seruyan	6 paket	10.000.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Seruyan	6 paket	10.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kab. Seruyan	15 dokumen	12.400.000	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kab. Seruyan	15 dokumen	0
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket bahan/material yang disediakan		8 paket	24.500.000	Jumlah Paket bahan/material yang disediakan	Kab. Seruyan	8 paket	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Seruyan	135 dokumen	290.500.000	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Seruyan	135 dokumen	134.358.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan Mesin yang diadakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang	30 Unit	495.000.000	Jumlah Peralatan Mesin yang diadakan	Kab. Seruyan	30 Unit	29.911.600

			Disediakan						
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Seruyanx	10 unit	310.000.000	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Seruyanx	10 unit	0
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Seruyan	100 buah	185.000.000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Seruyan	20 unit	29.911.600
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit kerja yang teryalani jasa Penunjang urusan pemerintahnya	Kab. Seruyan	4 Unit	933.248.000	Jumlah unit kerja yang teryalani jasa Penunjang urusan pemerintahnya	Kab. Seruyan	4 Unit	769.325.280
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Seruyan	500 laporan	14.300.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Seruyan	500 laporan	14.300.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Seruyan	48 laporan	166.170.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Seruyan	48 laporan	102.365.280
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	12 laporan	752.778.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	12 laporan	652.660.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Kab. Seruyan	50 Unit	308.985.000	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Kab. Seruyan	50 Unit	241.005.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Seruyan	20 unit	242.340.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Seruyan	20 unit	173.290.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Seruyan	50 unit	41.690.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Seruyan	50 unit	42.760.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Seruyan	6 unit	24.955.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Seruyan	6 unit	24.955.000

	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PERSENTASE RUMAH YANG DITANGANI AKIBAT BENCANA	Kab. Seruyan	90%	1.065.576.000	PERSENTASE RUMAH YANG DITANGANI AKIBAT BENCANA	Kab. Seruyan	100%	355.667.000
	<i>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>	Jumlah rumah yang didata akibat bencana	Kab. Seruyan	10 unit	148.500.000	Jumlah rumah yang didata akibat bencana	Kab. Seruyan	10 unit	93.504.000
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	4 laporan	65.000.000	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	4 laporan	16.921.000
	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Kab. Seruyan	4 dokumen	83.494.000	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Kab. Seruyan	4 dokumen	76.583.000
	<i>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Rumah yang dibangun dan direhab	Kab. Seruyan	24 unit	840.762.000	Jumlah Rumah yang dibangun dan direhab	Kab. Seruyan	5 unit	243.552.000
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Kab. Seruyan	15 unit	495.560.000	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Kab. Seruyan	1 unit	76.922.000
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Kab. Seruyan	10 unit	345.202.000	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Kab. Seruyan	4 unit	166.630.000
	<i>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</i>	Jumlah izin yang diterbitkan	Kab. Seruyan	4 ijin	76.280.000	Jumlah izin yang diterbitkan	Kab. Seruyan	4 ijin	18.611.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kab. Seruyan	4 laporan	76.280.000	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kab. Seruyan	4 laporan	18.611.000

	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	RASIO PERMUKIMAN LAYAK HUNI	Kab. Seruyan	85%	2.280.695.000	RASIO PERMUKIMAN LAYAK HUNI	Kab. Seruyan	85%	396.932.000
	<i>Penataan dan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</i>	Jumlah Laporan Kawasan kumuh yang ditata dan tingkatkan		1 dokume n	98.864.000	Jumlah Laporan Kawasan kumuh yang ditata dan tingkatkan		1 dokume n	0
	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh		1 dokumen	98.864.000	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh		1 dokumen	0
	<i>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</i>	Jumlah Kawasan pemukiman kumuh yang ditingkatkan	Kab. Seruyan	5 kawasan	2.181.831.000	Jumlah Kawasan pemukiman kumuh yang ditingkatkan	Kab. Seruyan	5 kawasan	396.932.000
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Kab. Seruyan	30 unit	455.750.000	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Kab. Seruyan	4 unit	134.610.000
	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun	Kab. Seruyan	40 unit	1.726.081.000	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun	Kab. Seruyan	8 unit	262.322.000
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	PERSENTASE LUASAN PERMUKIMAN KUMUH DI KAWASAN PERKOTAAN	Kab. Seruyan	85%	682.500.000	PERSENTASE LUASAN PERMUKIMAN KUMUH DI KAWASAN PERKOTAAN	Kab. Seruyan	85%	137.000.000
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Permukiman diluar Kawasan Kumuh yang ditangani	Kab. Seruyan	6 kawasan	682.500.000	Jumlah Permukiman diluar Kawasan Kumuh yang ditangani	Kab. Seruyan	6 kawasan	137.000.000
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Kab. Seruyan	20 rumah	457.000.000	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	Kab. Seruyan	20 rumah	137.000.000

	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kab. Seruyan	2 dokumen	225.500.000	Jumlah Dokumen Kesepakatan	Kab. Seruyan	2 dokumen	0
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	CAKUPAN PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Kab. Seruyan	80%	580.750.000	CAKUPAN PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Kab. Seruyan	80%	146.326.800
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah PSU Perumahan yang di selenggarakan	Kab. Seruyan	10 paket	580.750.000	Jumlah PSU Perumahan yang di selenggarakan	Kab. Seruyan	10 paket	146.326.800
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Kab. Seruyan	3 lokasi	155.000.000	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Kab. Seruyan	1 lokasi	146.326.800
	Perbaikan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian	Jumlah Lokasi PSU perumahan yang dilaksanakan perbaikan	Kab. Seruyan	2 lokasi	425.750.000	Jumlah Lokasi PSU perumahan yang dilaksanakan perbaikan	Kab. Seruyan	2 lokasi	0
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase sengketa tanah garapan yang diselesaikan	Kab. Seruyan	85%	64.830.000	Persentase sengketa tanah garapan yang diselesaikan	Kab. Seruyan	85%	45.750.000
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah sengketa tanah garapan yang diselesaikan	Kab. Seruyan	10 Kasus	64.830.000	Jumlah sengketa tanah garapan yang diselesaikan	Kab. Seruyan	10 Kasus	45.750.000
	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota	Kab. Seruyan	5 dokumen	24.830.000	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota	Kab. Seruyan	5 dokumen	24.850.000
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	3 Berita Acara	40.000.000	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi	Kab. Seruyan	3 Berita Acara	20.900.000

	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase ganti kerugian dan santunan tanah yang diselesaikan	Kab. Seruyan	85%	64.926.000	Persentase ganti kerugian dan santunan tanah yang diselesaikan	Kab. Seruyan	85%	19.050.000
	<i>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah dokumen Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan santunan Tanah	Kab. Seruyan	4 Dokumen	64.926.000	Jumlah dokumen Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan santunan Tanah	Kab. Seruyan	4 Dokumen	19.050.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	Kab. Seruyan	4 dokumen	64.926.000	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	Kab. Seruyan	4 dokumen	19.050.000
	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Cakupan Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absente	Kab. Seruyan	85%	579.896.000	Cakupan Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absente	Kab. Seruyan	85%	245.506.000
	<i>Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente dalam 1 Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Jumlah Subyek dan Obyek Redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah yang ditetapkan	Kab. Seruyan	1 Dokumen	579.896.000	Jumlah Subyek dan Obyek Redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah yang ditetapkan	Kab. Seruyan	1 Dokumen	245.506.000
	Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	4 dokumen	269.938.000	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	4 dokumen	129.924.000
	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	2 dokumen	0	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	2 dokumen	10.400.000

	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria.	Kab. Seruyan	3 Berita Acara		Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria.	Kab. Seruyan	3 Berita Acara	15.328.000
	Inventarisasi Subyek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	2 dokumen	309.958.000	Jumlah Data Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	42 dokumen	89.854.000
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	CAKUPAN PENGGUNAAN TANAH	Kab. Seruyan	85%	536.923.200	CAKUPAN PENGGUNAAN TANAH	Kab. Seruyan	85%	29.165.200
	<i>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah tanah yang hamparan digunakan dalam satu kabaten/kota	Kab. Seruyan	3 Bidang Tanah	536.923.200	Jumlah tanah yang hamparannya digunakan	Kab. Seruyan	3 Bidang Tanah	29.165.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	10 Laporan	81.443.200	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	10 Laporan	29.165.000
	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	Kab. Seruyan	20 Dokumen	363.100.000	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	Kab. Seruyan	20 dokumen	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	12 Dokumen	91.750.000	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	12 dokumen	

2.5. Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat

Pada Tahun 2026 usulan Program Kegiatan Masyarakat Sebagian telah diakomudir oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan yang diusulkan melalui Desa atau Kelurahan yang kemudian dilaksanakan dengan Musrembang Desa, Hasil Musrembang Desa disampaikan kepada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang kemudian dilakukan Evaluasi Kelayakan usulan tersebut dengan memutuskan usulan mana yang nantinya akan dimasukkan dalam Musrembang Kabupaten dalam hal ini oleh Bappeda Kabupaten Seruyan.

Usulan Program oleh masyarakat meliputi Program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni baik yang meliputi Pembangunan Rumah Baru atau Rehabilitasi Rumah/Peningkatan Kualitas Rumah menjadi layak huni , Program pembangunan Rumah Musibah kebakaran yang terjadi diwilayah Kabupaten Seruyan serta Inventarisasi dan Verifikasi usulan Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) agar status tanah masyarakat dapat diterbitkan Sertifikat.

Pada Tahun 2025 usulan Masyarakat baik melalui Musrembang Desa atau Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Seruyan masih sama dengan tahun tahun sebelumnya yakni usulan Program Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Antisipasi Bencana Alam dan Musibah Kebakaran serta usulan Program TORA. Untuk Mengakomudir usulan tersebut Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah merencanakannya melalui Pembangunan Rumah Baru, Rehabilitasi Rumah dan Bantuan Bahan Bangunan. Untuk Program TORA dilaksanakan Inventarisasi dan Verifikasi agar usulan tersebut dapat segera diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Usulan Program Kegiatan oleh Masyarakat dan pemangku kebijakan disajikan pada table berikut ini :

Tabel T-C.32. (Tabel 11)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Pemerintah Kabupaten Seruyan

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Lokasi	Jumlah Unit	catatan Analisa
1	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	CAKUPAN REDISTRIBUSI TANAH SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE			Usulan Perubahan Status Kawasan disetujui oleh Kementrian dan berproses
2	<i>Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Jumlah Subyek dan Obyek Redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah yang ditetapkan			Usulan Perubahan Status Kawasan disetujui oleh Kementrian dan berproses
3	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			Usulan Perubahan Status Kawasan disetujui oleh Kementrian dan berproses
4	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	CAKUPAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			
5	<i>Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</i>	Jumlah Pemukiman diluar kawasan Kumuh yang ditangani	Kab. Seuyan		
6	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak yang diperbaiki	Kab. Seuyan	5 unit	Masih dalam tahap Verifikasi penerima bantuan
7	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kab. Seuyan	8 unit	
8	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	CAKUPAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			
9	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemukiman diluar kawasan Kumuh yang ditangani	Kab. Seuyan	5 unit	

Daftar Usulan Aspirasi Masyarakat Tahun 2026 melalui Musrembang (Tabel 12)

No	Usulan	Desa/Kelurahan/Kecamatan	Volume	Satuan	Catatan
1	Rehabilitasi/Pembangunan Rumah	Batu Menangis Batu Ampar	-	-	Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan pagu anggaran
2	Rehabilitasi/Pembangunan Rumah	Asam Baru Danau Seluluk	30	Unit Rumah	Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan anggaran
3	Rehabilitasi/Pembangunan Rumah	Rungau Raya Danau Seluluk	-	-	Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan anggaran
4	Rehabilitasi/Pembangunan Rumah	Tanjung Hara Danau Seluluk	-	-	Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan anggaran
5	Rehabilitasi/Pembangunan Rumah	Panimba Raya Danau Seluluk	-	-	-
6	Rehabilitasi/Pembangunan Rumah	Tanjung Paring Danau Seluluk	-	-	Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan anggaran
7	Rehabilitasi/Pembangunan Rumah	Ulak Batu Danau Sembuluh	10	Unit Rumah	Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan anggaran
8	Rehabilitasi/Pembangunan Rumah	Paren Danau Sembuluh	-	-	-
9	Rehabilitasi/Pembangunan Rumah	Sembuluh II Danau Sembuluh	50	Unit Rumah	-
10	Rehabilitasi/Pembangunan Rumah	Banua Usang Danau Sembuluh	-	-	-
11	Rehabilitasi/Pembangunan Rumah	Palingkau Danau Sembuluh	-	-	Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan anggaran
12	Rehabilitasi/Pembangunan Rumah	Bahaur Hanau	67	Unit Rumah	Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan pagu anggaran
13	Rehabilitasi/Pembangunan Rumah	Paring Raya Hanau	145	Unit Rumah	Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan pagu anggaran

14	Rehabilitasi/Pembangunan Rumah	Derangga Hanau	15	Unit Rumah	-
15	Rehabilitasi/Pembangunan Rumah	Kuala Pembuang I Seruyan Hilir	-	-	Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan pagu anggaran
16	Rehabilitasi/Pembangunan Rumah	Kuala Pembuang I Seruyan Hilir	-	-	Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan pagu anggaran
17	Rehabilitasi/Pembangunan Rumah	Kuala Pembuang I Seruyan Hilir	-	-	Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan pagu anggaran
18	Rehabilitasi/Pembangunan Rumah	Kuala Pembuang I Seruyan Hilir	-	-	Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan pagu anggaran
19	Rehabilitasi/Pembangunan Rumah	Kuala Pembuang I Seruyan Hilir	-	-	Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan pagu anggaran
20	Rehabilitasi/Pembangunan Rumah	Sungai Perlu Seruyan Hilir	-	-	Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan pagu anggaran
21	Rehabilitasi/Pembangunan Rumah	Sungai Undang Seruyan Hilir	-	-	Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan pagu anggaran
22	Bantuan Bahan Bangunan	Sungai Undang Seruyan Hilir	-	-	Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan pagu anggaran
23	Rehabilitasi/Pembangunan Rumah	Sungai Undang Seruyan Hilir	-	-	Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan pagu anggaran
24	Rehabilitasi/Pembangunan Rumah	Sungai Undang Seruyan Hilir	-	-	Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan pagu anggaran
25	Bantuan Bahan Bangunan	Sungai Undang Seruyan Hilir	-	-	Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan pagu anggaran
26	Rehabilitasi/Pembangunan Rumah	Pematang Limau Seruyan Hilir	-	-	Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan pagu anggaran
27	Rehabilitasi/Pembangunan Rumah	Muara Dua Seruyan Hilir	-	-	Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan pagu anggaran
28	Rehabilitasi/Pembangunan Rumah	Tanjung Rangas Seruyan Hilir	-	-	Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan pagu anggaran

29	Rehabilitasi/Pembangunan Rumah	Kuala Pembuang II Seruyan Hilir	-	-	Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan pagu anggaran
30	Rehabilitasi/Pembangunan Rumah	Kuala Pembuang II Seruyan Hilir	-	-	Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan pagu anggaran
31	Rehabilitasi/Pembangunan Rumah	Kuala Pembuang IISeruyan Hilir	-	-	Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan pagu anggaran
32	Rehabilitasi/Pembangunan Rumah	Persil Raya Seruyan Hilir	-	-	Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan pagu anggaran
33	Rehabilitasi/Pembangunan Rumah	Persil Raya Seruyan Hilir	-	-	Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan pagu anggaran
34	Rehabilitasi/Pembangunan Rumah	Persil Raya Seruyan Hilir	-	-	Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan pagu anggaran
35	Rehabilitasi/Pembangunan Rumah	Halimaung Jaya Seruyan Hilir Timur	-	-	Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan pagu anggaran
36	Rehabilitasi/Pembangunan Rumah	Halimaung Jaya Seruyan Hilir Timur	-	-	usulan disampaikan ke Dinas kesehatan
37	Rehabilitasi/Pembangunan Rumah	Bangun HarjaSeruyan Hilir Timur	15	Unit Rumah	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, memperhatikan kewenangan provinsi dan melengkapi data dukung (readliness criteria)
38	Rehabilitasi/Pembangunan Rumah	Tumbang Darap Seruyan Hulu	1	Unit Rumah	Usulan disampaikan ke Dinas Kesehatan
39	Rehabilitasi/Pembangunan Rumah	Tabiku Seruyan Raya	4	Unit Rumah	Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan pagu anggaran
40	Rehabilitasi/Pembangunan Rumah	Lanpasa Seruyan Raya	10	Unit Rumah	Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan pagu anggaran
41	Rehabilitasi/Pembangunan Rumah	Mugi Panyuhu Seruyan Tengah	30	Unit Rumah	Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan pagu anggaran
42	Rehabilitasi/Pembangunan Rumah	Tumbang Langkai Suling Tambun	35	Unit Rumah	diteruskan ke Perangkat Daerah teknis untuk dimasukkan kedalam RENJA dan dilaksanakan pekerjaannya dengan anggaran yang ada

43	Rehabilitasi/Pembangunan Rumah	Tumbang Salau Suling Tambun	20	Unit Rumah	diteruskan ke Perangkat Daerah teknis untuk dimasukkan kedalam RENJA dan dilaksanakan pekerjaannya dengan anggaran yang ada
44	Rehabilitasi/Pembangunan Rumah	Tumbang Setoli Suling Tambun	25	Unit Rumah	diteruskan ke Perangkat Daerah teknis untuk dimasukkan kedalam RENJA dan dilaksanakan pekerjaannya dengan anggaran yang ada
45	Rehabilitasi/Pembangunan Rumah	Tumbang Magin Suling Tambun	12	Unit Rumah	diteruskan ke Perangkat Daerah teknis untuk dimasukkan kedalam RENJA dan dilaksanakan pekerjaannya dengan anggaran yang ada
46	Rehabilitasi/Pembangunan Rumah	Tanjung Tukul Suling Tambun	5	Unit Rumah	diteruskan ke Perangkat Daerah teknis untuk dimasukkan kedalam RENJA dan dilaksanakan pekerjaannya dengan anggaran yang ada
47	Rehabilitasi/Pembangunan Rumah	Rantau Betung Suling Tambun	20	Unit Rumah	diteruskan ke Perangkat Daerah teknis untuk dimasukkan kedalam RENJA dan dilaksanakan pekerjaannya dengan anggaran yang ada
48	Rehabilitasi/Pembangunan Rumah	Tumbang Gugup Suling Tambun	20	Unit Rumah	diteruskan ke Perangkat Daerah teknis untuk dimasukkan kedalam RENJA dan dilaksanakan pekerjaannya dengan anggaran yang ada

Usulan Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Seruyan Tahun 2026
pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (tabel 13)

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	CATATAN
1	ALIANSYAH	Rehabilitasi/Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Lanpasa Kecamatan Seruyan Raya, Kab. Seruyan	20	unit	Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan pagu anggaran
2	MUTMAINNAH	Rehabilitasi/Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	Kel. Rantau Pulut, Kab. Seruyan	5	buah	Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan pagu anggaran
3	MUTMAINNAH	Rehabilitasi/Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Gantung Pangayuh, Kab. Seruyan	5	buah	Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan pagu anggaran
4	MUTMAINNAH	Rehabilitasi/Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Mugi Panyuhu, Kab. Seruyan	5	buah	Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan pagu anggaran
5	MUTMAINNAH	Rehabilitasi/Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	Kel. Rantau Pulut , Kab. Seruyan	3	buah	Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan pagu anggaran
6	MUTMAINNAH	Rehabilitasi/Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	Kel. Rantau Pulut, Kab. Seruyan	10	buah	Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan pagu anggaran
7	RUBIANTO	Rehabilitasi/Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	Desa asam baru, Kab. Seruyan	1	paket	Usulan disampaikan ke Dinas PUPR
8	ARAHMAN	Rehabilitasi/Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	Desa pembuang hulu I kecamatan hanau, Kab. Seruyan	5	unit	Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan pagu anggaran
9	ZULKIPLI KHAIDIR	Rehabilitasi/Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	Kelurahan Kuala Pembuang II, Kab. Seruyan	2	kk	Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan pagu anggaran

10	HARY DARMAWAN	Rehabilitasi/Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	Desa sukamandang, Kab. Seruyan	10	unit	Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan pagu anggaran
11	HADINUR, S. Pd	Rehabilitasi/Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	Desa terawan, Kab. Seruyan	25	rumah/kk	Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan pagu anggaran
12	HARDIANTO, S.E	Rehabilitasi/Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Tumbang Langkai, Kec. Suling Tambun, Kab. Seruyan	30	Unit	pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan anggaran
13	WIWIN	Rehabilitasi/Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Sukamandang, Kab. Seruyan	3	unit	pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan anggaran

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yang menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Program Jangka Panjang Nasional 2005-2025

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Kebijakan Nasional perumahan dan kawasan permukiman yang termaktub dalam pasal-pasal berikut:

- Bab II.2 Huruf D 5: Memenuhi kebutuhan hunian bagi Masyarakat untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.
- Bab IV.1.5. Butir 19: Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya diarahkan pada penyelenggaraan pembangunan perumahan yang terjangkau daya beli masyarakat

Arah kebijakan perumahan dan kawasan permukiman yang diamanatkan dalam Undang - Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Program Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana, sarana, permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara profesional, kredibel, mandiri, efisien.
- b. Penyelenggaraan pembangunan perumahan beserta prasarana, sarana pendukungnya yang mandiri mampu membangkitkan potensi pembiayaan yang berasal dari masyarakat dan pasar modal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan
- c. Pembangunan Perumahan beserta prasarana, sarana pendukungnya yang memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup

2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, pembangunan perumahan tercantum pada pasal 129 huruf a yaitu: Dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, setiap orang berhak menempati, menikmati, dan/atau memiliki/memperoleh rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Amanat pembangunan perumahan dan kawasan permukiman untuk Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia sesuai pasal 15 adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/kota di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dan provinsi;
- b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dengan berpedoman pada strategi nasional dan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- c. Menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
- d. Menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota dalam penyediaan rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman;
- e. Melaksanakan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan Industri bahan bangunan yang mengutamakan sumberdaya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan;
- f. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
- g. Melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/kota;
- h. Melaksanakan peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
- i. Melaksanakan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman;
- j. Melaksanakan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional;

- k. Melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
- l. Mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional dan provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
- m. Mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR;
- n. Memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR;
- o. Menetapkan lokasi Kasiba dan Lisiba; dan
- p. Memberikan pendampingan bagi orang perseorangan yang melakukan pembangunan rumah swadaya.

3.2. Tujuan dan Sasaran

3.2.01 Tujuan

Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah untuk merealisasikan pelaksanaan misi Kabupaten Seruyan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan kabupaten ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan kecamatan secara umum dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan untuk lima tahun ke depan menetapkan tujuan yakni dapat memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang Infrastruktur Dasar bagi seluruh masyarakat serta meningkatkan pemanfaatan SDA untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan terciptanya kondisi lingkungan yang bersih, indah, teduh dan nyaman yang berwawasan lingkungan. Tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Adalah sebagai Berikut

“ Terciptanya lingkungan perumahan dan permukiman yang layak huni dengan prasarana dan sarana umum dalam kondisi baik”

3.2.02 Sasaran

Sasaran adalah suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek, biasanya dalam waktu satu tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan selama kurun waktu lima tahun sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Bupati Seruyan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan serta Peraturan Bupati Seruyan Nomor: 8 Tahun 2019 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Dinas Perumahan rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan menetapkan sasaran sebagai berikut :

SASARAN	Terlaksananya Pembangunan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten kota
	Meingkatkan Kualitas Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang berpenghasilan rendah
	Meningkatnya hunian yang layak dan terjangkau serta didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai
	Meningkatnya Layanan dan Informasi Pertanahan

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2026 mencakup 9 program 19 Kegiatan dan 48 sub kegiatan yang ditampilkan pada tabel berikut :

**Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2026**

(tabel 14)

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1	04	01	2.01		<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>
1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1	04	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1	04	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1	04	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	04	01	2.02		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>
1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1	04	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
1	04	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1	04	01	2.03		<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>
1	04	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
1	04	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
1	04	01	2.05		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>
1	04	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
1	04	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
1	04	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
1	04	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
1	04	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
1	04	01	2.06		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>
1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1	04	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1	04	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1	04	01	2.06	0008	Penyediaan Bahan/Material
1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1	04	01	2.07		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>
1	04	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1	04	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1	04	01	2.08		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
1	04	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1	04	01	2.09		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
1	04	02	2.01		<i>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>
1	04	02	2.01	0002	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
1	04	02	2.01	0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
1	04	02	2.03		<i>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>
1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
1	04	02	2.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
1	04	02	2.06		<i>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</i>
1	04	02	2.06	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	03	2.02		<i>Penataan dan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</i>
1	04	03	2.02	0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh
1	04	03	2.03		<i>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</i>
1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
1	04	03	2.03	0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
1	04	04	2.01		<i>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</i>
1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
1	04	04	2.01	0008	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
1	04	05	2.01	0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
2	10	04	2.01		<i>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.</i>

2	10	04	2.01	0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	10	04	2.01	0004	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
2	10	05	2.01		<i>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>
2	10	05	2.01	0001	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	10	06			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
2	10	06	2.01		<i>Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 Daerah Kabupaten/ Kota</i>
2	10	06	2.01	0001	Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah
2	10	06	2.01	0002	Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
2	10	10	2.01		<i>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</i>
2	10	10	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
2	10	10	2.01	0002	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota
2	10	10	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan pada Tahun 2026 mengajukan Usulan sebanyak 8 Program 19 kegiatan dan 48 Sub Kegiatan dengan total pagu sebesar Rp. 13.622.403.000 tetapi pada saat terjadi Evaluasi Anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melakukan perubahan/pengurangan anggaran menjadi Rp. 7.875.713.094 yang secara detail kami sajikan pada tabel 10 berikut ini :

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
- KAB. SERUYAN
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN						7.875.713.094,00							8.343.703.924,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.536.241.894,00							7.777.628.924,00	
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						7.536.241.894,00							7.777.628.924,00	
1.	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						6.500.316.094,00						-	6.623.348.324,00	
		[Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Perangkat Daerah]	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100	95	100	100	6.500.316.094,00	-	-	-	-	-	-	6.623.348.324,00	-
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	-			11 Dokumen	18.225.000,00			-	-	Pegawai pada Disperkimtan	-	20.225.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	11.550.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai pada Disperkimtan		13.550.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	4.275.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai pada Disperkimtan		4.275.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2.400.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai pada Disperkimtan		2.400.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	0,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan	Pegawai pada Disperkimtan		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang terlayani administrasi keuangannya	-			4 Unit	5.070.219.414,00			-	-	Pegawai pada Disperkimtan	-	5.170.719.414,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/bulan	5.063.719.414,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai pada Disperkimtan		5.163.719.414,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	1.800.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai pada Disperkimtan		1.800.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	4.700.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai pada Disperkimtan		5.200.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah unit krja yang terlayani administrasi barang Milik Daerah	-			4 Unit	9.956.000,00			-	-	Pegawai pada Disperkimtan	-	9.956.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	9.106.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai pada Disperkimtan		9.106.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	850.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai pada Disperkimtan		850.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang teryalani administrasi kepegawaianya	-			36 Orang	53.700.000,00			-	-	Pegawai pada Disperkimtan	-	53.700.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				160 Paket	52.000.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai pada Disperkimtan		52.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				80 Dokumen	0,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai pada Disperkimtan		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				6 Dokumen	1.700.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Memban gun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk penin gkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan p emberantas an kemiskinan	Pegawai pada Disperkimtan		1.700.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Memban gun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk penin gkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan p emberantas an kemiskinan	Pegawai pada Disperkimtan		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	0,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Memban gun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk penin gkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan p emberantas an kemiskinan	Pegawai pada Disperkimtan		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang teryalani administrasi umumnya	-			4 unit	307.973.800,00			-	6. Memban gun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk penin gkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan p emberantas an kemiskinan	Pegawai pada Disperkimtan	-	328.506.030,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Paket	10.249.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Memban gun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk penin gkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan p emberantas an kemiskinan	Pegawai pada Disperkimtan		10.240.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				40 Paket	76.081.800,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Memban gun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk penin gkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan p emberantas an kemiskinan	Pegawai pada Disperkimtan		76.081.800,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	12.500.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Memban gun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk penin gkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan p emberantas an kemiskinan	Pegawai pada Disperkimtan		12.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	64.785.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Memban gun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk penin gkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan p emberantas an kemiskinan	Pegawai pada Disperkimtan		64.785.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	10.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Memban gun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk penin gkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan p emberantas an kemiskinan	Pegawai pada Disperkimtan		10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				15 Dokumen	0,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Memban gun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk penin gkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan p emberantas an kemiskinan	Pegawai pada Disperkimtan		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				8 Paket	0,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Memban gun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk penin gkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan p emberantas an kemiskinan	Pegawai pada Disperkimtan		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				135 Laporan	134.358.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Memban gun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk penin gkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan p emberantas an kemiskinan	Pegawai pada Disperkimtan		154.899.230,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang yang diadakan	-			30 unit	29.911.600,00			-	6. Memban gun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk penin gkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan p emberantas an kemiskinan	Pegawai pada Disperkimtan	-	29.911.600,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				10 Unit	0,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Memban gun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk penin gkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan p emberantas an kemiskinan	Pegawai pada Disperkimtan		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	29.911.600,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Memban gun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk penin gkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan p emberantas an kemiskinan	Pegawai pada Disperkimtan		29.911.600,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit kerja yang terlaksana jasa Penunjang urusan pemerintah	-			4 unit	769.325.280,00			-	6. Memban gun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk penin gkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan p emberantas an kemiskinan	Pegawai pada Disperkimtan	-	769.325.280,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500 Laporan	14.300.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Memban gun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk penin gkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan p emberantas an kemiskinan	Pegawai pada Disperkimtan		14.300.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				48 Laporan	102.365.280,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Memban gun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk penin gkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan p emberantas an kemiskinan	Pegawai pada Disperkimtan		102.365.280,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	652.660.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Memban gun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk penin gkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan p emberantas an kemiskinan	Pegawai pada Disperkimtan		652.660.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit kerja yang terpelihara barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			4 unit	241.005.000,00			-	6. Memban gun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk penin gkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan p emberantas an kemiskinan	Pegawai pada Disperkimtan	-	241.005.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				20 Unit	173.290.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Memban gun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk penin gkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan p emberantas an kemiskinan	Pegawai pada Disperkimtan		173.290.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	42.760.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Memban gun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk penin gkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan p emberantas an kemiskinan	Pegawai pada Disperkimtan		42.760.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	24.955.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Memban gun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk penin gkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan p emberantas an kemiskinan	Pegawai pada Disperkimtan		24.955.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						355.667.000,00						-	321.667.000,00	
		[Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan terkena relokasi akibat program pemerintah]	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	90	100	100	355.667.000,00	-	-	-	-	-	-	321.667.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	<i>Jumlah data rumah akibat bencana dan relokasi program kabupaten/kota</i>	-			20 Laporan	93.504.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan	Masyarakat terdampak bencana	-	93.504.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan														
			<i>Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan</i>				4 Dokumen	16.921.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan	Masyarakat terdampak bencana		16.921.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</i>				4 Dokumen	76.583.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan	Masyarakat terdampak bencana		76.583.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah yang dibangun dan direhab akibat bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	-			3 unit	243.552.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan	Masyarakat terdampak bencana	-	203.552.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana														
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				1 Unit Rumah	76.922.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan	Masyarakat terdampak bencana		36.922.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana														
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				2 Unit Rumah	166.630.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan	Masyarakat terdampak bencana		166.630.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	<i>Jumlah ijin pembangunan dan pengembangan perumahan yang diterbitkan</i>	-			2 dokumen perijinan	18.611.000,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	6. Memban gun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk penin gkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan p emberantas an kemiskinan	Pengembang Perumahan dan masyarakat	-	24.611.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</i>				4 Laporan	18.611.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	6. Memban gun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk penin gkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan p emberantas an kemiskinan	Pengembang Perumahan dan masyarakat		24.611.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
3.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						396.932.000,00						-	436.932.000,00	
		[Meningkatnya kualitas kawasan permukiman]	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	100	85	100	100	396.932.000,00	-	-	-	-	-	-	436.932.000,00	-
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	<i>Jumlah Laporan Kawasan kumuh yang ditata dan tingkatkan</i>	-			1 laporan	0,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	6. Memban gun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk penin gkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan p emberantas an kemiskinan	Masyarakat Berpenghasilan Rendah	-	0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				1 Dokumen	0,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	6. Memban gun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk penin gkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan p emberantas an kemiskinan	Masyarakat Berpenghasilan Rendah		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan pemukiman kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	-			5 kawasan	396.932.000,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	6. Memban gun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk penin gkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan p emberantas an kemiskinan	Masyarakat Berpenghasilan Rendah	-	436.932.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni														
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				4 Unit Rumah	134.610.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	6. Memban gun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk penin gkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan p emberantas an kemiskinan	Masyarakat Berpenghasilan Rendah		154.610.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				8 Unit	262.322.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan	Masyarakat Berpenghasilan Rendah		282.322.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
4.	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH						137.000.000,00						-	187.000.000,00	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perumahan dan kawasan pemukiman kumuh yang dicegah perkembangannya	-			6 kawasan	137.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan	Masyarakat Berpenghasilan Rendah	-	187.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha														
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				7 Unit Rumah	137.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan	Masyarakat Berpenghasilan Rendah		187.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.04.2.01.0007	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru</i>				4 Laporan	0,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan	Masyarakat Berpenghasilan Rendah		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
5.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						146.326.800,00						-	208.681.600,00	
		[Meningkatnya penyediaan PSU Permukiman]	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	100	80	100	100	146.326.800,00	-	-	-	-	-	-	208.681.600,00	-
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	<i>Jumlah PSU Perumahan yang di selenggarakan</i>	-			1 Paket	146.326.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan	Masyarakat	-	208.681.600,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.05.2.01.0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan														
			<i>Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan</i>				2 Lokasi	0,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan	Masyarakat		62.354.800,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum</i>				1 Lokasi	146.326.800,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan	Masyarakat		146.326.800,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						339.471.200,00							566.075.000,00	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						339.471.200,00							566.075.000,00	
1.	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN						45.750.000,00						-	49.750.000,00	
		[Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan]	Persentase Terselaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi	85	85	85	85	45.750.000,00	-	-	-	-	-	-	49.750.000,00	-
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah kasus sengketa tanah garapan yang diselesaikan</i>	-			5 kasus	45.750.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan	Pihak yang bersengketa	-	49.750.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				5 Berita Acara	20.900.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan	Pihak yang bersengketa		22.900.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				5 Dokumen	24.850.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan	Pihak yang bersengketa		26.850.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN						19.050.000,00						-	20.050.000,00	
		[Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan]	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	85	85	85	85	19.050.000,00	-	-	-	-	-	-	20.050.000,00	-
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan santunan Tanah	-			5 dokumen	19.050.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan	Mayarakat yang menerima ganti kerugian dan santunan	-	20.050.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	19.050.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan	Mayarakat yang menerima ganti kerugian dan santunan		20.050.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
3.	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE						245.506.000,00						-	467.110.000,00	
		[Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)]	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee	85	85	85	85	245.506.000,00	-	-	-	-	-	-	467.110.000,00	-
	2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Subyek dan Obyek Redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah yang ditetapkan	-			1 dokumen	245.506.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan	Masyarakat	-	467.110.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.06.2.01.0002	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah														
			Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				2 Dokumen	129.924.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan	Masyarakat		129.924.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.06.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				2 Dokumen	10.400.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan 03. Penanganan kemiskinan	Masyarakat		11.400.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.06.2.01.0006	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria														
			Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria.				3 Berita Acara	15.328.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan 03. Penanganan kemiskinan	Masyarakat		15.828.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.06.2.01.0008	Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah														
			Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				4 Dokumen	89.854.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan	Masyarakat		309.958.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
4.	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH						29.165.200,00						-	29.165.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah]	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah	100	85	100	100	29.165.200,00	-	-	-	-	-	-	29.165.000,00	-
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bidang tanah yang hamparannya digunakan dalam satu kabupaten	-			3 bidang tanah	29.165.200,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	6. Memban gun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk penin gkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan p emberantas an kemiskinan	Masyarakat	-	29.165.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				10 Laporan	29.165.200,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	6. Memban gun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk penin gkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan p emberantas an kemiskinan	Masyarakat		29.165.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.10.2.01.0002	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya				15 Dokumen	0,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	6. Memban gun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk penin gkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan p emberantas an kemiskinan	Masyarakat		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Dokumen	0,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan	Masyarakat		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	J U M L A H							7.875.713.094,00							8.343.703.924,00		

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan Tahun 2026 merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang sejalan dengan Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menerangkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Harapan kami, Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan Tahun 2026, menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan permukiman pada Tahun 2026 serta dapat dijadikan dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam rangka akuntabilitas dan transparansi kepada seluruh stakeholders, serta dasar dalam mengukur keberhasilan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi.

Plt. Kepala Dinas Prumahan Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Seuyan



ABDUL RAJAK, S.Pi., M.M
Pembina (IV/a)

NIP. 19751109 199604 1 003